

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan sebuah gambaran mengenai topik yang dibangun yaitu Arsitektur *Enterprise* Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Domain Data Dan Informasi Di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta.

I.1 Latar Belakang

Pada saat ini di era globalisasi, kemajuan teknologi informasi dalam suatu organisasi dapat menjadi solusi untuk mendukung berbagai aktivitas dan pengelolaan informasi di dalamnya. Teknologi informasi memainkan peran penting dalam mendukung bisnis dan membantu mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, setiap organisasi yang berencana menerapkan atau meningkatkan teknologi di masa depan pasti membutuhkan arsitektur *enterprise* yang sesuai. *Enterprise Architecture*, yang juga dikenal sebagai arsitektur *enterprise*, adalah penjelasan tentang tujuan dari para pemangku kepentingan yang mencakup informasi, fungsionalitas, lokasi organisasi, dan parameter kinerja (Yunis, R., & Surendro, K., 2009). Perencanaan arsitektur *enterprise* adalah proses menggambarkan arsitektur dengan menggunakan informasi yang mendukung kegiatan bisnis, serta merancang rencana untuk melaksanakan arsitektur tersebut (Rerung, R. R., 2017). Tujuan dari perencanaan arsitektur *enterprise* adalah memberikan panduan bagi pengembangan teknologi informasi di masa depan, sehingga teknologi informasi tersebut dapat mendukung tujuan bisnis (Arifin, D., 2019).

Penelitian tugas akhir ini berfokus pada lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) di Provinsi DKI Jakarta sebagai objek penelitian. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) merupakan salah satu lembaga pemerintahan. Untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan pemerintah, diperlukan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Menurut Pasal 1(1) Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, "Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik" (disingkat SPBE) adalah instansi pemerintah yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (SPBE) dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintah Daerah. Evaluasi ini setidaknya mencakup tiga aspek utama, yaitu Tata Kelola SPBE, Layanan SPBE, dan Kebijakan SPBE. (Birokrasi, 2023).

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) merupakan sebuah badan di tingkat daerah yang bertanggung jawab dalam memberikan dukungan administratif untuk urusan pemerintahan daerah terkait pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan negara, dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan, serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan panduan dari gubernur negara. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dengan kecepatan dan mutu yang optimal, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) memiliki target untuk menerapkan layanan yang cepat dan berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, dukungan teknologi informasi yang terintegrasi menjadi penting dalam mendukung berbagai layanan bisnis yang ada dalam Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) (BPKAD TUBA, 2023).

Dengan semakin majunya teknologi informasi di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta, pengelolaan teknologi menjadi semakin kompleks. Dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), beragam penggunaan teknologi informasi membutuhkan integrasi menyeluruh antara berbagai sistem dan aplikasi yang digunakan. Kondisi ini mengakibatkan perluasan domain data dan interaksi antar sistem menjadi sulit, sejalan dengan visi, misi, dan tujuan yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta.

Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta, solusi yang diusulkan adalah mengembangkan perancangan *Enterprise Architecture* pada domain data dengan mengacu pada Peraturan Surat Edaran Menteri PAN-RB No. 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE. Perancangan ini melibatkan analisis kebutuhan

data yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi terintegrasi yang disebut Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti adalah.

1. Bagaimana menganalisis *Enterprise Architecture* yang sesuai untuk Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta?
2. Bagaimana membuat perancangan *Enterprise Architecture* Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada domain data di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah.

1. Menghasilkan hasil analisis *Enterprise Architecture* yang sesuai untuk Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta.
2. Menghasilkan rancangan *Enterprise Architecture* Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada domain data di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta.

I.4 Batasan Penelitian

Batasan Penelitian dari penyusunan tugas akhir ini adalah.

1. Perancangan *Enterprise Architecture* Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang berfokus pada domain data di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta memiliki keterkaitan dengan penelitian lain dengan judul Analisis dan Perancangan *Enterprise Architecture* Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Domain Bisnis di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta.
2. Perancangan *Enterprise Architecture* pada domain data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menggunakan *framework* TOGAF pada tahap

Preliminary Phase dengan output *Principle Catalog*, *Architecture Vision* dengan output *Stakeholder Map Matrix* dan *Value Chain Diagram*, *Data Architecture* dengan output yaitu *Data Architecture Requirements*, *Data Entity/Data Component Catalog*, *Data Entity/Business Function Matrix*, *System/Data Matrix*, dan *Logical Data Diagram*.

3. Perancangan *Enterprise Architecture* pada domain data hanya berfokus kepada pengolahan data pada proses bisnis utama yang terdiri dari proses bisnis perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban

I.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari dari penyusunan penelitian tugas akhir ini adalah.

1. Penelitian tugas akhir ini memiliki manfaat bagi perusahaan/instansi karena menghasilkan sebuah usulan rancangan Arsitektur *Enterprise* pada domain data di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta.
2. Hasil dari penelitian ini berpotensi memberikan manfaat bagi peneliti lain dengan menyediakan sebuah rancangan Arsitektur *Enterprise* untuk sebuah instansi pemerintahan yang berbasis elektronik.